

## **Pendidikan Gratis, Siapa Bilang ?<sup>1</sup>**

***Oleh : Fahriza Marta Tanjung, S.Pd.\****

Di tengah-tengah gencarnya penolakan berbagai lapisan rakyat terhadap kebijakan *I don't care*-nya Pemerintahan SBY yang menaikkan harga BBM maka sedemikian gencar juga pemerintah melakukan sosialisasi pendidikan gratis di berbagai media. Seperti yang dapat dibaca, didengar dan dilihat Pemerintah terus mengkampanyekan bahwa dengan dialihkannya sebagian subsidi BBM ke pembiayaan pendidikan maka pendidikan dasar akan dapat dinikmati rakyat secara gratis. Pada hal sebenarnya, dengan anggaran subsidi BBM yang dialihkan untuk pendidikan, dengan angka yang telah ditetapkan oleh pemerintah tidak akan mungkin untuk menggratiskan pendidikan dasar.

Kenaikan berbagai jenis BBM sekitar 20 – 40 %, menurut perhitungan pemerintah akan menghemat subsidi BBM sebesar Rp. 10,5 triliun. Dana inilah kemudian yang digunakan, ditambah dengan berbagai program yang sudah ada di APBN sebesar 7,3 triliun, untuk disubsidikan kepada rakyat miskin secara langsung melalui berbagai program. Salah satu program yang dilaksanakan sebagai kompensasi adalah pemberian bantuan pendidikan kepada siswa sekolah dasar dan menengah.

Dari kompensasi kenaikan BBM, untuk tahun ini bidang pendidikan mendapat jatah 5,6 triliun yang akan digunakan untuk memberikan bea siswa kepada sekitar 9,6

---

\* Dimuat pada Harian Kompas, 21 Maret 2005

\*\* Penulis adalah Staf Program pada Sentra Advokasi untuk Hak Pendidikan Rakyat (SAHdaR) di Medan

juta siswa miskin. Departemen Pendidikan Nasional telah merencanakan untuk memberikan bea siswa kepada siswa miskin yang di sekolah, anak yang putus sekolah dan siswa yang tidak mampu melanjutkan. Melalui program BKM (Bantuan Khusus Murid) yang diperuntukkan bagi siswa miskin di sekolah, setiap bulannya siswa SD akan memperoleh Rp. 25.000,-, siswa SMP memperoleh Rp. 65.000,- dan siswa SMA akan memperoleh Rp. 120.000,-.

Angka-angka ini muncul berdasarkan catatan Susenas tahun 2003 yang menyebutkan bahwa rata-rata biaya pendidikan per bulan untuk SD Rp. 26.526,-, SMP Rp. 66.027,- dan SMA Rp. 116.266,-. Dengan referensi ini, maka Depdiknas beranggapan bahwa bea siswa BKM yang diberikan akan mampu menutupi kebutuhan siswa miskin. Apalagi bea siswa BKM yang akan diberikan ini, naik dua sampai lima kali lipat dibandingkan tahun lalu. Maka pemberian bea siswa ini akan dapat menutupi biaya langsung seperti iuran sekolah, buku dan alat tulis maupun biaya tidak langsung seperti uang transport dan uang saku. Demikianlah kira-kira harapan optimis Depdiknas.

Namun sangat disayangkan, hitungan-hitungan tersebut menafikan realitas di lapangan. Apalagi cuma berpegang pada Survei Sosial Ekonomi Nasional yang diterbitkan tahun 2003 oleh BPS. Berdasarkan catatan dan pengalaman Sentra Advokasi untuk Hak Pendidikan Rakyat (SAHdaR), selama mendampingi berbagai kasus pendidikan khususnya di Kota Medan, maka angka yang tertera pada Susenas tahun 2003 sangat jauh dari realitanya.

Untuk seorang siswa biasanya ada beberapa pos yang harus dibiayai, sebagai biaya langsung maupun tidak langsung, seperti buku, sumbangan pendidikan (komite sekolah), biaya kutipan-kutipan, biaya pakaian dan buku tulis serta biaya transportasi. Menurut perhitungan yang dilakukan SAHdaR maka diperkirakan biaya yang dibutuhkan per siswa sebelum kenaikan BBM adalah siswa SD sebesar Rp. 63.166,- per bulannya, siswa SMP Rp. 92.383,- dan siswa SMA Rp. 130.800,-. Bisa dilihat betapa timpangnya dengan data yang ada pada Susenas.

Depdiknas juga, sepertinya lupa, mungkin karena sudah dikaburkan oleh nafsu untuk memenuhi hasrat pemerintah menaikkan harga BBM. Bahwa Susenas tersebut dikeluarkan pada tahun 2003 sementara kenaikan BBM dilakukan pada Maret 2005. Masih untung, kalau Susenas tersebut memang benar-benar datanya dikumpulkan pada tahun 2003. Bagaimana kalau Susenas tersebut dikeluarkan laporannya tahun 2003, sementara pengumpulan datanya dilakukan pada tahun 2002? Tentu akan semakin besar kesenjangan antara Susenas tersebut dengan biaya pendidikan yang riil ditanggung oleh masyarakat. Jadi, Depdiknas jangan buru-buru sumringah dengan kenaikan bea siswa BKM beberapa kali lipat.

Depdiknas juga tidak memperhitungkan, bahwa akibat kenaikan BBM maka akan menaikkan komponen-komponen kehidupan lainnya. Tentunya akan berpengaruh pada rata-rata biaya pendidikan yang harus ditanggung oleh siswa. Harga buku akan mengalami kenaikan karena harga kertas, harga tinta dan ongkos produksi akan naik. Uang sumbangan pendidikan (komite sekolah) juga akan mengalami kenaikan karena harga kebutuhan sekolah seperti kertas, kapur tulis,

listrik dan lain-lain juga akan naik. Kutipan-kutipan di sekolah juga akan meningkat, apalagi jika kesejahteraan guru tidak juga ditingkatkan. Biaya transportasi juga akan mengalami kenaikan, seperti yang sudah terlihat sekarang, walaupun organisasi pengusaha angkutan kota belum mengeluarkan tarif resmi, tetapi masing-masing supir angkutan kota sudah menetapkan tarif pribadi. Demikian juga dengan seragam, alat tulis, tas, sepatu dan buku tulis hampir dapat dipastikan akan mengalami kenaikan juga.

Menurut prediksi SAHdaR masing-masing pos pembiayaan pendidikan di atas akan mengalami kenaikan, paling tidak, antara 20 % - 30 %. Hampir sama dengan yang disebutkan oleh Drajad Hari Wibowo pada *Kompas* (7 Maret 2004), harga-harga terus melambung pada kisaran 20 % - 30 %. Dengan prediksi kenaikan 20 % - 30 % maka diperkirakan rata-rata biaya pendidikan yang ditanggung oleh siswa SD per bulannya antara Rp. 79.766,- sampai Rp. 92.866,-, siswa SMP Rp. 119.693,- sampai Rp. 136.223,- dan siswa SMA Rp. 185.460,- sampai Rp. 207.123,-. Semakin jelas terlihat, betapa data Susenas tahun 2003 tidak layak digunakan dan tidak mewakili kepentingan rakyat. Dengan perhitungan ini, maka bea siswa yang akan diberikan pemerintah hanya akan memenuhi 25 % - 65 % biaya pendidikan rata-rata per siswanya. (Lihat Tabel – 1)

No	Jenjang Pendidikan	Rata-rata biaya pendidikan/ siswa / bulan			
		Biaya sebelum BBM Naik	Subsidi BBM tahun 2005 melalui BKM	Prediksi biaya setelah kenaikan BBM	
				Terendah	Tertinggi
1	SD	Rp. 63.166,-	Rp. 25.000,-	Rp. 79.766,-	Rp. 92.866,-
2	SMP	Rp. 92.383,-	Rp. 65.000,-	Rp. 119.693,-	Rp. 136.223,-
3	SMA	Rp. 130.800,-	Rp. 120.000,-	Rp. 185.460,-	Rp. 207.123,-

Tabel – 1 : Prediksi rata-rata biaya pendidikan/ siswa/ bulan

Lalu untuk menanggung sisa biaya pendidikan tadi akan ditanggung oleh siapa ? Patut diingat, bahwa pemberian bea siswa BKM ini diperuntukkan bagi siswa miskin. Artinya, kemampuan orang tua siswa ini tentunya sangat terbatas untuk menanggung biaya pendidikan anak-anaknya. Ditambah lagi dengan kenaikan harga BBM memberikan dampak terhadap kenaikan kebutuhan pokok lainnya sementara pendapatan juga belum tentu akan bertambah.

Pemberian bea siswa BKM ini juga ternyata baru akan disalurkan kepada siswa pada bulan Juni 2005. Jadi, untuk menutupi berbagai selisih kenaikan biaya akibat kenaikan BBM, antara bulan Maret 2005 sampai Juni 2005 nanti, siswa miskin tadi akan disubsidi dengan apa? Kalau dibiarkan seperti ini, maka niat di awal untuk mengurangi anak yang putus sekolah, malah akan berbalik keadaannya. Justeru akan menambah anak yang putus sekolah pasca Juni 2005 nanti.

Maka semakin jelas terlihat, bahwa pengalihan subsidi BBM, dengan skema kompensasi seperti yang dilakukan pemerintah sekarang, tidak akan menggratiskan pendidikan. Patut dipertanyakan, mengapa pemerintah dengan fasih dan getolnya menyatakan pendidikan akan gratis dengan pengalihan subsidi BBM. Mulai dari

pejabat pusat sampai pejabat daerah, bahkan anggota dewan pun ikut-ikutan latah menyatakan pendidikan akan gratis dengan pengalihan subsidi BBM.

Wajar kalau kemudian timbul kecurigaan dibalik pernyataan-pernyataan tersebut. Sampai hari ini berbagai upaya penolakan terhadap kenaikan harga BBM terus dilakukan. Isu pendidikan gratis merupakan isu seksi yang sangat menyentuh hajat hidup orang banyak dan akar persoalan rakyat secara langsung. Pemerintah merekayasa isu pendidikan gratis untuk menutupi berbagai kekurangannya dalam menangani berbagai dampak dari kenaikan harga BBM. Atau pemerintah sengaja merekayasa isu pendidikan gratis guna mencari popularitas dan simpati dari masyarakat di tengah-tengah penolakan terhadap kenaikan harga BBM.

Untuk persoalan rekayasa, pemerintah kita memang jagonya. Jangankan untuk merekayasa, melanggar perundangan dan peraturan yang ada saja sudah dianggap biasa. Sebagaimana diketahui bahwa pendidikan gratis sebenarnya merupakan kewajiban pemerintah untuk menjalankannya. Bukan hanya karena adanya pengalihan subsidi BBM. Tidak kurang, mulai dari UUD 1945, UU Ratifikasi Konvensi Hak Anak (KHA) dan UU Sistem Pendidikan Nasional, keseluruhannya menggariskan pendanaan pendidikan dasar harus dilaksanakan secara gratis oleh pemerintah.

Terlepas dari penolakan atau penerimaan terhadap kenaikan harga BBM, ternyata pengalihan subsidi BBM untuk pendidikan tidak akan mampu menggratiskan pendidikan dasar. Karenanya pendidikan dasar gratis cuma omong kosong. Berbagai pernyataan dan iklan pemerintah di berbagai media cenderung menyesatkan bahkan

tidak mendidik dan meninabobokan rakyat dengan mimpi-mimpi pendidikan gratis. Jangankan untuk pendidikan gratis, pendidikan yang murah saja masih jauh dari harapan. Sudah saatnya pemerintah menjalankan perundangan secara konsekuen. Dengan mengikuti UUD 1945 yang telah menetapkan anggaran untuk pendidikan 20% dari APBN maka pendidikan gratis akan dapat diwujudkan.